BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Bandung merupakan salah satu kota di Negara Indonesia yang terletak di Provinsi Jawa Barat. Portal resmi Pemerintah Kota Bandung (bandung.go.id) mengungkapkan bahwa Kota Bandung memiliki visi, yaitu terwujudnya Kota Bandung yang unggul, nyaman, dan sejahtera. Untuk merealisasikan visi tersebut, maka terdapat misi-misi yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
2. Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
3. Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
4. Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

Kota Bandung tumbuh menjadi kota yang indah dan memiliki penataan yang baik. Penataan kota yang intensif berimbas pada meningkatnya infrastruktur, sarana, dan prasarana kota sehingga menambah aset pemerintah yang harus dikelola dengan baik. Peran pemerintah Kota Bandung ini tidak luput dari masyarakat Kota Bandung yang ikut serta dalam berkerja sama menjaga lingkungan, sarana, dan prasarana tersebut. Selain itu peran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berjalan dengan baik.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat Pemerintah Daerah (Provinsi maupun Kabupaten/Kota) di Indonesia. SKPD adalah pelaksana fungsi pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak. Dasar hukum yang berlaku sejak tahun 2004 untuk pembentukan SKPD adalah Pasal 120 UU no. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan situs portal resmi Pemerintah Kota Bandung (bandung.go.id), Kota Bandung memiliki 43 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terdiri dari asisten, Bagian-bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat, dan RSUD.

Pemilihan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Kota Bandung sebagai objek penelitian dikarenakan SKPD merupakan bagian dari pemerintah daerah yang melaksanakan fungsi dan bertanggung jawab atas pemerintahan dan pelayanan publik, baik secara langsung ataupun tidak langsung. SKPD Kota Bandung mempunyai peran dan tanggungjawab di bidang pengelolaan keuangan karena SKPD diberikan alokasi dana (anggaran) dan barang/aset yang dibutuhkan. Selain itu, Pemerintah Kota Bandung menjadi satu-satunya kota yang mendapat nilai A pada Hasil Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Daerah di Wilayah I, yang meliputi Pulau Sumatera, Provinsi Banten, dan Jawa Barat yang terdiri dari 172 kota dan kabupaten. Pada tahun 2018 ini, Kota Bandung berhasil mempertahankan prestasi yang ketiga kalinya dalam penilaian tersebut. Penghargaan tersebut diserahkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) kepada Pemerintah Kota Bandung melalui Asisten Administrasi Umum dan Kepegawaian, Evi S. Shaleha di Kota Batam.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Sejak era reformasi, masyarakat Indonesia telah maju menuju era keterbukaan. Dalam era keterbukaan ini, masyarakat semakin menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan lebih dapat menyampaikan aspirasi yang berkembang (Yulianti, 2014). Undang-Undang KIP (Keterbukaan Informasi Publik) No. 14 tahun 2008 menyatakan bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/ atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/ atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban-kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya sebagai instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil pada pelayanan publik (Cefrida, 2014). Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah, Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Masyarakat saat ini membutuhkan informasi yang relevan dan transparan berkaitan dengan hasil dari program yang telah direncanakan maupun dilaksanakan oleh pemerintah. Dengan informasi dan pengungkapan tersebut, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus mau dan mampu menjadi subyek pemberi informasi atas aktivitas dan kinerja keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu, konsisten, dan dapat dipercaya. Instansi pemerintah yang wajib menerapkan sistem akuntabilitas kinerja dan menyampaikan pelaporannya adalah instansi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian Kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD). Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang (seharusnya) terjadi dengan kinerja yang diharapkan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (triwulan) dan tahunan. Pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi

pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu (PERMENPAN No. 53 Tahun 2014).

Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung 2012 sd 2016									
Komponen	Bobot	2012	2013	2014	2015	Kinerja Komponen berdasarkan Bobot	Bobot	2016	Kinerja Komponen berdasarkan Bobot
Perencanaan Kinerja	35	17.5	18.22	18.66	24.96	53.31	30	24.82	83.20
Pengukuran Kinerja	20	9.5	6.01	10.75	19.70	53.75	25	20.67	78.80
Pelaporan Kinerja	15	7.59	7.8	8.67	11.78	57.80	15	11.89	78.53
Evaluasi Kinerja	10	3.74	5.12	5.27	8.04	52.70	10	7.47	80.40
Capaian Kinerja	20	10.55	13.16	11.79	15.74	58.95	20	15.76	78.70
Total	100	48.88	50.31	55.14	80.22		100	80.61	
Kategori		C	CC	CC	A			A	

Gambar 1.1

Hasil Evaluasi AKIP Kota Bandung Tahun 2012 s.d. 2016

Sumber: LKIP Sekretariat Kota Bandung Tahun 2016

Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2016, Kota Bandung mendapatkan hasil evaluasi AKIP dengan memperoleh nilai A. hal tersebut juga diikuti dengan meningkatnya total skor dari tahun 2012 s.d. 2016, yaitu pada tahun 2012 dengan total skor 48,88 (C), 2013 dengan total skor 50,31 (CC), 2014 dengan total skor 55,24 (CC), 2015 dengan total skor 80,22 (A) dan tahun 2016 dengan total skor 80,61 (A). Namun, dengan meningkatnya hasil evaluasi yang diperoleh, terjadi penurunan rata-rata capaian kinerja pada beberapa sasaran. Hal tersebut dapat dilihat pada data berikut:

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018													
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Renstra (2018)	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai LPPD	Nilai	2.8999	2.9610	102.11	2.9758	3.0606	103.48	3.0759	2.9919	97.27	3.0185	101.39
2	Persentase Kecamatan Berkinerja Baik	%	33.33	46.67	140.02	50.00	60.00	120.00	66.67	83.33	124.99	100	60.00
3	Persentase Kelurahan Berkinerja Baik	%	6.62	6.62	100.00	30.46	44.37	145.67	53.64	54.97	102.48	100	44.37
	Rata-rata Capaian Kinerja				114.04	-	-	123.05	-	-	108.24	-	68.59

Gambar 1.2

Analisis Pencapaian Sasaran 1 Pemerintah Kota Bandung

Sumber: LKIP Sekretariat Kota Bandung Tahun 2016

Pada gambar 1.2, terlihat bahwa terjadi penurunan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 123,05% menjadi 108,24%.

Capaian Kinerja Sasaran 5 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Dan Perbandingan dengan Target Akhir Renstra Tahun 2018													
NO	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2014			Tahun 2015			Tahun 2016			Tahun 2018	
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	Target	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Nilai Evaluasi AKIP Kota Bandung Komponen Pelaporan Kinerja	Angka	8.50	8.67	102.00	9.50	11.78	124.00	10.50	11,89	113.24	12.50	94.24
2	Nilai Evaluasi AKIP Sekretariat Daerah	Angka	60.1	61.49	102.31	65.1	70.79	108.74	70.1	78,60	112.13	80.1	88.38
	Rata-Rata Capaian Kinerja Sasaran				102.16	-	-	116.37	-	-	102.97	-	91.31

Gambar 1.3

Analisis Pencapaian Sasaran 5 Pemerintah Kota Bandung

Sumber: LKIP Sekretariat Kota Bandung Tahun 2016

Pada gambar 1.3, terlihat bahwa terjadi penurunan rata-rata capaian kinerja pada tahun 2016 dibandingkan dengan tahun 2015, yaitu dari 116,37% menjadi 102,97%.

Dalam meneliti Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), terdapat berbagai faktor yang mempengaruhinya, seperti kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, pengendalian akuntansi, pengendalian intern dan juga budaya organisasi. Peneliti menggunakan dua faktor sebagai variabel yang mempengaruhi AKIP. Dua faktor tersebut merupakan faktor finansial dan non-finansial, yaitu kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi. Menurut Kenis (1979) dalam Arifin W. (2012), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan anggaran tersebut dimengerti oleh orang yang bertanggungjawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Sedangkan pengendalian akuntansi merupakan suatu sistem formal berbasis akuntansi yang digunakan oleh organisasi untuk melakukan aktivitas sehingga tercapainya akuntabilitas, yang dimana tujuan akuntansi sektor publik adalah untuk mengelola sumber daya yang ekonomis, efisien, dan efektivitas (Mardiasmo, 2009:45 dalam Suhaesti, 2016)

Pengelolaan pemerintah daerah yang akuntabilitas tidak bisa lepas dari anggaran pemerintah. Anggaran dibutuhkan oleh sebuah organisasi untuk menerjemahkan keseluruhan strategik dalam rencana dan tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Menurut Cefrida (2014), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut. Dengan adanya sasaran anggaran yang jelas, aparat pelaksana anggaran juga akan terbantu dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi terhadap kinerja aparat. Salah satu penyebab tidak efektif dan efisiennya anggaran dikarenakan ketidakjelasan sasaran anggaran yang mengakibatkan aparat pemerintah daerah mengalami kesulitan dalam penyusunan target-target anggaran (Handayani, 2013).

Selain itu, adanya sasaran anggaran yang jelas akan mempermudah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas

organisasi dalam rangka untuk mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketidajelasan sasaran anggaran akan menyebabkan pelaksana anggaran menjadi bingung, tidak tenang dan tidak puas dalam bekerja. Selanjutnya target anggaran yang disusun akan sesuai dengan sasaran yang ingin dicapai organisasi. Menurut Bastian (2001) dalam Putra (2016), penyusunan anggaran dapat dikatakan baik apabila memenuhi persyaratan: (1) berdasarkan program, (2) berdasarkan pusat pertanggung-jawaban dan (3) sebagai alat perencanaan dan pengendalian.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015-2016. Penggunaan anggaran hingga Rp 392,87 triliun tersebut dinilai tak efisien karena tidak ada kejelasan hasil yang dicapai, ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak ada kaitan antara kegiatan dengan sasaran, hingga rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitrawati (2017), Kanji (2016) serta Cahyani (2015) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh secara positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah. Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh Herawaty (2014) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran memberikan pengaruh negatif terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah daerah.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja adalah pengendalian akuntansi. Berdasarkan SAS No. 48 pada tahun 1984 tentang definisi Pengendalian Intern, Pengendalian Akuntansi, meliputi struktur organisasi serta prosedur dan catatan yang berhubungan dengan usaha untuk menjaga keamanan aktiva dan dipercayai catatan keuangan perusahaan, oleh karena pengendalian ini disusun sehingga dapat memberikan keyakinan. Dalam hal ini yang termasuk dalam pengendalian akuntansi adalah sistem perencanaan, sistem pelaporan dan prosedur monitoring yang didasarkan pada informasi. Menurut Abdullah (2005) dalam Anjarwati (2012) dalam konteks otonomi daerah pendelegasian otoritas tanggung

jawab kepala daerah kepada 7 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dibawahnya mendapatkan dua hal penting dalam menerapkan sistem pengendalian akuntansi. Pertama, mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan. Kedua, penggunaan sistem pengendalian akuntansi memungkinkan kepala SKPD membuat keputusan yang lebih baik dan melakukan kontrol operasi dengan lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Arifin W. (2012), pengendalian akuntansi berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Penelitian oleh Suhaesti (2016) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, membuktikan bahwa jika pengendalian akuntansi baik maka kinerja akuntabilitas instansi pemerintah juga semakin baik. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2016) serta Cefrida (2014) menyatakan bahwa pengendalian akuntansi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja.

Berdasarkan fenomena yang telah dipaparkan, dapat dilihat bahwa Pemerintah masih menghadapi beberapa permasalahan. Selain itu juga, hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah”.

1.3 Perumusan Masalah

Menurut PERMENPAN No. 53 Tahun 2014, pengukuran dan perbandingan kinerja dalam laporan kinerja harus cukup menggambarkan posisi kinerja instansi pemerintah. Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan tewujudnya kinerja, tercapainya hasil program dan hasil kegiatan. Indikator kinerja instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi. Indikator kinerja yang digunakan harus memenuhi kriteria spesifik, dapat diukur, dapat dicapai, relevan, dan sesuai dengan kurun waktu tertentu. Adanya sasaran anggaran yang jelas dapat membantu aparat pelaksana anggaran dalam perealisasiannya, secara tidak langsung ini akan mempengaruhi kinerja aparat. Menurut Hardi dan Rusli (2014), kejelasan sasaran anggaran merupakan sejauh

mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan tujuan agar anggaran tersebut dapat dimengerti oleh orang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran tersebut

Akan tetapi faktanya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) mencatat ada Rp 392,87 triliun anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang tidak memberikan hasil. Temuan tersebut didapatkan dari hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) 2015-2016. Penggunaan anggaran hingga Rp 392,87 triliun tersebut dinilai tak efisien karena tidak ada kejelasan hasil yang dicapai, ukuran kinerja yang tidak jelas, tidak ada kaitan antara kegiatan dengan sasaran, hingga rincian kegiatan tidak sesuai dengan maksud kegiatan. Hal tersebut menyebabkan akuntabilitas kinerja pemerintah menjadi kurang baik.

1.4 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis dapat mengidentifikasi pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Pertanyaan penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.
2. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.
3. Bagaimana pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.
4. Bagaimana pengaruh pengendalian akuntansi secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disebutkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Meneliti kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.

2. Meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan pengendalian akuntansi secara simultan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.
3. Meneliti pengaruh kejelasan sasaran anggaran secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.
4. Meneliti pengaruh pengendalian akuntansi secara parsial terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada SKPD Kota Bandung.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan yang dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1.6.1 Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah demi berkembangnya dunia pendidikan.

1.6.2 Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dan masyarakat umum untuk memahami keterkaitan antara kejelasan sasaran anggaran, pengendalian akuntansi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.7 Ruang Lingkup Penelitian

1.7.1 Variabel Penelitian

Dalam penelitian ini, parameter-parameter yang digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja dan menjadi variabel independen atau variabel X adalah kejelasan sasaran anggaran (X1) dan pengendalian akuntansi (X2). Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini atau variabel Y adalah akuntabilitas kinerja.

1.7.2 Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kota Bandung, yang memiliki 43 (empat puluh enam) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD ini terdiri dari Asisten, Bagian-bagian, Badan, Dinas, Inspektorat, Sekretariat dan RSUD. Penelitian ini merupakan

penelitian kuantitatif dengan menggunakan kuesioner untuk melakukan analisis terhadap kedua variabel independen (X1 dan X2).

1.8 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab. Sistematika penulisan skripsi secara garis besar disajikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, latar belakang penelitian yang didalamnya membahas fenomena yang layak untuk diteliti serta dikaitkan dengan teori yang ada, perumusan masalah yang didasarkan pada latar belakang penelitian, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis, serta sistematika penulisan secara umum.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan landasan teori yang digunakan sebagai dasar penelitian mengenai pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap anggaran alokasi modal pemerintah daerah. Selain itu, bab ini menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian yang sedang dilakukan, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian dan rincian objek penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan pendekatan, metode, dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang menjawab atau menjelaskan masalah penelitian yang meliputi uraian mengenai karakteristik penelitian, alat pengumpulam data, tahapan penelitian, populasi dan sampel, pengumpulan dan sumber data dan pengujian hipotesis.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas penjelasan dari hasil penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan dalam mendukung penelitian kemudian dianalisis, serta dikaitkan dengan landasan teori yang relevan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil yang diperoleh setelah dilaksanakannya penelitian serta disajikan saran yang dapat menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya